

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Rehabilitasi Mangrove ditinjau dari *Community development*

Rehabilitasi mangrove di Indonesia merupakan isu hangat yang menjadi prioritas bagi upaya mitigasi wilayah pesisir seiring dengan meningkatnya isu abrasi wilayah pesisir karena pengelolaan dan pembangunan yang lebih berorientasi pada ekonomi. Beberapa penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab meningkatnya upaya rehabilitasi mangrove di Indonesia baik dari persepsi dan partisipasi masyarakat maupun faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat. Pelibatan masyarakat dalam *community development* dapat dianalisis dengan mengetahui persepsi masyarakat terhadap permasalahan abrasi wilayah pesisir dan pengelolaannya (Gumilar, 2012:198). Penelitian Gumilar tersebut dalam Jurnal Akuatika (2012:198-211) menganalisis menggunakan teori Arnstein (1969:216) yang menggambarkan partisipasi masyarakat sebagai suatu pola bertingkat (*ladder patern*) yang terdiri dari 8 tingkat, yakni *manipulation* (memanipulasi), *therapy* (memulihkan), *informing* (menginformasikan), *consultation* (merundingkan), *placation* (mendiamkan), *partnership* (bekerjasama), *delegated power* (pendelegasian wewenang) dan *citizen Control* (publik mengontrol). Tingkatan paling bawah merupakan tingkat partisipasi masyarakat sangat rendah, kemudian tingkat yang paling atas merupakan tingkat dimana partisipasi masyarakat sudah sangat besar dan kuat. Delapan tingkatan partisipasi tersebut kemudian dikelompokkan menjadi tiga bagian; *nonparticipation* (tidak ada partisipasi) berjenjang dari *manipulation* dan *therapy*, tokenisme yang memiliki rentang dari

informing, *consultation* dan *placation*, dan yang ketiga *citizen power* (publik berdaya) yang berkuasa sedang benar-benar mendahulukan peran serta publik dalam berbagai hal.

Gumilar (2012:207) mengungkapkan bahwa persepsi dan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian hutan mangrove berada pada tahap penyampaian informasi dan konsultasi atau tingkat tokenisme yaitu suatu tingkat partisipasi masyarakat didengar dan diperkenankan pendapat, namun tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Menurut teori Arnstein (1969), pada *tokenism*, otoritas yang berkuasa menciptakan citra, tidak lagi menghalangi partisipasi publik. Namun kenyataannya berbeda, benar partisipasi publik dibiarkan, namun mereka mengabaikannya dan mereka tetap mengeksekusi rencananya semula. Ketika berada di tingkat *informing*, mereka menginformasikan macam-macam program yang akan dan sudah dilaksanakan namun hanya dikomunikasikan searah, dan publik belum dapat melakukan komunikasi umpan-balik secara langsung (Arnstein, 1969: 217).

Beberapa penelitian juga menganalisis faktor yang mempengaruhi keterlibatan masyarakat dalam *community based*. Penelitian Abdullah et al. (2014:121) mengemukakan bahwa faktor-faktor *community based* dalam konservasi dan rehabilitasi salah satunya adalah faktor psikologi. Penelitian tersebut menggunakan teori Baral and Stern (2011:123) yang mengemukakan indikator faktor ekologi, institusi, dan psikologi untuk menentukan berhasil atau gagalnya pendekatan *community based conservation*. *Willingness to participate* merupakan faktor inti untuk mengevaluasi faktor psikologi terhadap partisipasi komunitas lokal dalam rehabilitasi mangrove dengan menggunakan pendekatan *community based conservation*. *Willingness to participate* juga mempunyai korelasi dengan gender, pendidikan, ras, keuntungan dan penerimaan resiko, tetapi

tidak berhubungan dengan faktor jarak tempat tinggal. Hal tersebut membuat pendekatan CBC (*Community-Based Conservation*) harus diorganisasi oleh intitusi rehabilitasi mangrove yang berasal dari institusi lokal setempat. Komunitas lokal mempunyai keinginan untuk berpartisipasi dalam program CBC sebagai pekerja sambilan yang juga dibayar. Persepsi positif dari komunitas lokal mengenai CBC merupakan hubungan yang baik yang dapat digunakan oleh pemimpin rehabilitasi dan konservasi mangrove untuk memperkuat kerjasama dengan penduduk dan asosiasi penduduk. Sekali penduduk lokal mengenali keuntungan dan kepentingan mengenai mangrove di masa depan, kemungkinan program rehabilitasi dapat dilakukan melalui CBC dengan bimbingan teknik yang minim. Selain itu, sikap yang pro-lingkungan juga merupakan faktor penting dalam menentukan respon komunitas lokal pada konservasi lingkungan dan mangrove (Abdullah, Said, Omar, & Abra, 2014:130).

Hadi (2019:71) mengemukakan bentuk keberhasilan rehabilitasi mangrove dengan pendekatan *community development* diantaranya seperti yang dilakukan oleh CSR Pertamina RU (Refinary Unit) Balongan dengan program budidaya mangrove di Karangsong. Budidaya mangrove dimulai tahun 2008 bertujuan untuk menanggulangi abrasi di Desa Karangsong. Pada tahun 2007, kerusakan pantai di Karangsong Kabupaten Indramayu mencapai 2,407,07 hektar. Tahun 2008 sampai tahun 2010, berturut-turut ditanam sebanyak 8000, 30,800, dan 5000 mangroves. Kemudian pada tahun 2012 ditanam sebanyak 10,000 mangrove. Tahun 2014 ketika tanaman mangrove telah tumbuh dengan baik, PT Pertamina memfasilitasi untuk mengembangkan menjadi eko-wisata dengan menanam tanaman lain seperti cemara laut, *widaralaut* dan *ketapang* dan membangun infrastruktur seperti *jogging track*. Lokasi ini menjadi tujuan turis dan juga taman pendidikan. Dengan banyaknya pengunjung, menumbuhkan kesempatan kerja dan kesempatan

berusaha seperti jasa parkir, penjual makanan dan minuman, jasa perahu wisata. Kelompok Pantai Lestari juga mampu menambah luasan mangrove untuk konservasi sebanyak 39 hektar. Selain budidaya mangrove, kelompok juga mendayagunakan mangrove untuk memproduksi berbagai produk seperti jamu, kecap, sabun dan berbagai variasi kosmetik. Buah mangrove untuk sirup, kue, dan coklat, daun mangrove untuk teh, sayur dan kripik. Biji mangrove untuk kecap dan propagules mangrove untuk komestik, pakan ikan. Meskipun perkembangan pendapatan kelompok belum nampak signifikan tetapi mampu memberikan pekerjaan tambahan dan meningkatkan kohesi sosial. Hal tersebut berdasarkan indikator keberhasilan *community development* menurut Hadi (2017:48) yang meliputi:

- (1) ekonomi: bahwa kegiatan *community development* mampu membuka lapangan kerja, lapangan usaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- (2) sosial: meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kompetensi anggota kelompok dalam mengelola kegiatan dikelompoknya
- (3) meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengurangan beban limbah, mengurangi penggunaan energi fosil dan sebagainya
- (4) ada inovasi dalam bentuk produk baru (kegiatan ikutan) atau metode baru. Misalnya kegiatan awal *community development* adalah budidaya mangrove, setelah mangrove berkembang menjadi hutan, diciptakan kegiatan baru.

Primavera (2008:345) dalam penelitiannya mengenai rehabilitasi mangrove di Filipina dan mengevaluasi faktor biofisik dan institusional dibalik kesuksesan dan kegagalan rehabilitasi mangrove, merekomendasikan protokol spesifik dan petunjuk kebijakan yang lebih luas untuk mengefektifkan rehabilitasi di sebuah negara. Primavera mereview program-program rehabilitasi

mangrove di Filipina dengan beberapa program dari pemerintah maupun NGO lokal dan internasional. Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa ada pelajaran bernilai dari komunitas Pagangan dimana mereka melakukan penanaman mangrove atas inisiatif sendiri tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Komunitas tersebut bahkan termasuk pada pendekatan kategori *self-help* yang merupakan tingkatan paling ideal dalam pendekatan *community development* menurut Mataritta-cascante & Brennan (2012). Komunitas tersebut pada awalnya melakukan penanaman untuk mencegah datangnya tipon dengan menanam propagul yang dilakukan oleh siswa sekolah, kemudian dilanjutkan oleh sekolah lainnya pada tahun berikutnya hingga menjadi kegiatan rutin setiap tahunnya. Penanaman skala kecil tersebut mencakup sejumlah 54 ha di tahun 1999 selanjutnya hasil panennya untuk bahan bakar kayu (Primavera & Esteban, 2008:347).

Keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi maupun ekowisata memerlukan strategi pengembangan untuk mencapai keberlanjutan. Oleh karena itu, Harahap (2001:114) menyatakan bahwa strategi pengembangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mangrove di antaranya dengan melakukan pembinaan, pelatihan dan bantuan usaha yang berkorelasi positif dengan partisipasi responden dalam perencanaan, penanaman, pemeliharaan dan pemanfaatan hutan mangrove. Kegiatan yang dilakukan adalah sosialisasi penyadaran masyarakat dan pendampingan kelompok hingga mandiri. Strategi pembinaan, pelatihan, dan bantuan usaha dilakukan dalam bentuk kegiatan sosialisasi, penyadaran masyarakat dan pendampingan kelompok serta mandiri. Langkah yang dilakukan terdiri dari persiapan, integrasi dalam masyarakat, pendidikan masyarakat, pembentukan kelompok, penguatan kapasitas kelompok, kelompok mandiri, monitoring dan evaluasi, replikasi, dan perluasan. Harahap (2001:110) juga mengemukakan beberapa kegiatan yang perlu dikembangkan agar partisipasi masyarakat dalam pengelolaan

mangrove lebih optimal yaitu; meningkatkan partisipasi seluruh kelompok masyarakat (*stakeholder*) yang ada dalam pengelolaan mangrove desa sesuai dengan peran dan fungsinya, mendorong penetapan status tanah areal penanaman di pinggir pantai menjadi jalur hijau, mendorong Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) membuat peraturan yang berkaitan dengan mangrove desa dan mendorong pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir mangrove kabupaten. Hal tersebut berdasarkan teori Hadi (1995:26) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat akan membawa pengaruh positif, dimana mereka akan bisa memahami dan mengerti berbagai permasalahan yang muncul serta memahami keputusan akhir yang diambil. Sehingga untuk mencapai sasaran tersebut, dalam elemen partisipasi masyarakat yang harus dipenuhi adalah adanya komunikasi dua arah yang terus menerus dan informasi yang berkenaan dengan proyek, program atau kebijakan disampaikan dengan berbagai teknik yang tidak hanya pasif dan formal tetapi juga aktif dan informal.

Dilihat dari teori perencanaan, *community development* dalam pandangan Friedmann (1981) merupakan bentuk *social learning* dan dalam perspektif Hudson (2007) merupakan *transactive planning*. *Social learning* dalam perencanaan pembangunan merupakan bentuk perencanaan evolusi dari desentralisasi yang membantu orang-orang untuk memperoleh akses yang lebih dalam pengambilan keputusan dalam kehidupan mereka (Hadi, 2012:26). Lebih lanjut menurut Friedman (2011:17) bahwa yang ditekankan dalam perencanaan ini adalah komunikasi otentik antara perencana dengan klien-aktor. Tujuan komunikasi tersebut adalah untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat, nilai dan perilaku, kapasitas untuk tumbuh melalui kerjasama dan semangat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman (Hadi, 2012:27). Friedmann (1981) juga menyampaikan bahwa pendekatan *social learning* merupakan sebuah model dari perencanaan yang

dipolitisasi. Model tersebut juga menggambarkan bagaimana membawa perubahan inovatif dari bawah (Friedmann, 1981:4). Sedangkan pendekatan perencanaan *transactive planning* fokus pada pengalaman utuh kehidupan masyarakat yang mengungkapkan masalah kebijakan untuk ditangani. Perencanaan tidak dilakukan dengan target komunitas yang tidak diketahui, melainkan kontak tatap muka dengan masyarakat yang terdampak dari keputusan (Hudson, Galloway, & Kaufman, 1979: 389). Lebih lanjut, Friedman (1973:1) dalam Hadi (2012:27) perencanaan transaktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menjembatani *communication gap* antara pengetahuan teknis perencana dengan pengetahuan keseharian masyarakat di lapangan. Menurut Hadi (2019:60) *community development* yang diinisiasi oleh perusahaan dan pemerintah bersifat struktural dimana keterlibatan masyarakat serta hasil pembelajaran bagi masyarakat dan perspektif masyarakat secara teoritis sangat terbatas atau tidak ada sama sekali. Hal tersebut sesuai dengan tipologi comdev Mataritta-Cascante (2012) bahwa comdev yang diarahkan termasuk pada kategori *imposed* dan *directed*. *Social learning* kemudian merupakan konsekwensi dari sebuah praktek inovatif yang secara karakteristik diambil dari bentuk *political struggle* untuk mengatasi status quo. Pendekatan perencanaan *social learning* dapat membuat kontribusi yang lebih luas, sebagaimana bekerja pada transformasi struktur politik pemerintah. Perencanaan “dari bawah” mungkin secara akurat menggambarkan kepentingan sebenarnya dari masyarakat yang terikat dalam produksi sosial dari hidup mereka (Friedmann, 1981:5).

B. Dampak Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial Rehabilitasi Mangrove dan Ekowisata

Mangrove pada dasarnya mempunyai nilai secara ekologi maupun ekonomi. Penelitian Alongi (2002: 332) yang meninjau status hutan mangrove dunia dan menawarkan perkiraan terbaik

bagi masa depan mangrove mengemukakan bahwa keberadaan mangrove terancam karena peningkatan populasi, pemanasan global, budidaya perikanan, industri, dan pembangunan kota. Selain itu, menurut Hadi (2018:1) abrasi pesisir yang disebabkan oleh reklamasi, penebangan pohon mangrove, perubahan tata guna lahan dan kegiatan manusia, juga menjadi ancaman keberlanjutan hutan mangrove. Oleh karena itu, Alongi (2002) dalam penelitiannya menggunakan teori Turner et al., (1993:344), bahwa konservasi sumberdaya mangrove harus dilakukan dengan asas ekonomi. Hal tersebut tidak terlepas dari peran manusia untuk melindungi dan menjaga sumberdaya alam yang mendatangkan pemasukan ekonomi. Mangrove mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sumberdaya perikanan lainnya. Dampak ekonomi dari rehabilitasi mangrove adalah nilai dari mangrove itu sendiri yang diestimasikan sebesar 9990 ha/tahun, yang merupakan nilai ekonomi tertinggi kedua setelah estuary dan seagrass, serta lebih besar dari nilai ekonomi terumbu karang dan laut terbuka (Costanza et al. 1998:4).

Barbier and Strand (1998:151) memperkirakan dampak perubahan area mangrove pada produksi udang di sekitar pantai di Campeche, Mexico. Penelitian mereka menghasilkan bahwa perikanan dapat menjadi sensitif pada level eksploitasi mangrove. Jika ekosistem mangrove dibabat melebihi level ukuran dari 2km/tahun, kemungkinan akan terjadi penurunan sederhana pada area mangrove yang mengarah pada ketidakseimbangan, pengurangan hasil panen udang, dan pendapatan. Selain itu, mangrove terbukti dapat melindungi pesisir dari tipon, dan melindungi sumberdaya lainnya seperti ikan, kepiting, dan udang, juga memperluas lahan, yakni mangrove dapat menutupi hingga 600 ha.

Analisis keberlanjutan dilakukan oleh Foucat (2002:511), yakni menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan pada pengelolaan ekowisata berbasis komunitas. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan indikator berdasar pada pendekatan manajemen terintegrasi, khususnya aspek politik, sosial-ekonomi, dan aspek lingkungan. Indikator sosial pada hasil penelitian tersebut, menunjukkan adanya:

- a. Kohesi sosial. Ekowisata menunjukkan kerjasama antara organisasi sosial dan kohesi. Komunitas skala kecil tertolong karena perencanaan dan implementasi program konservasi yang difasilitasi hanya dengan mempunyai sejumlah anggota yang terlibat. Bentuk kerjasama organisasi komunitas bagi kegiatan konservasi merupakan indikator positif dari kohesi sosial antara gender, serta antara anggota yang bekerjasama maupun tidak.
- b. Kepentingan sosial bagi wilayah; jika sebuah proyek berbasis komunitas berhasil sebagai proyek yang menguntungkan, maka komunitas lain akan meniru program tersebut. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan kerjasama struktur sosial-politik dalam CBEM (*Community-Based Ecotourism Management*), dan mempromosikan kohesi sosial sebagai indikator bagi keberlanjutan ekowisata.
- c. Kedaulatan. Organisasi diluar pemerintah secara umum terlibat dalam inisiatif komunitas ekowisata, terutama peran sekretaris yang bertanggungjawab dalam interaksi dan bekerjasama dengan institusi lain. Bagaimanapun juga, kerjasama merupakan otonomi penuh dan tidak dipandu oleh institusi lain yang menyediakan kedaulatan bagi eksploitasi sumberdaya alam dan organisasi sosial.

- d. Komitmen; Ekowisata membutuhkan pekerjaan penuh waktu bagi anggota kerjasama meskipun di musim puncak. Anggota harus menunjukkan komitmen dan kepercayaan mereka kerjasama ekowisata. Hal itu dikarenakan ekowisata digambarkan sebagai sumber utama penghasilan sehingga konservasi sumberdaya alam dan imbal jasanya merupakan prioritas bagi komunitas. Keuntungan ekowisata yang paling penting adalah satwa liar dan habitat konservasi. Keuntungan selanjutnya adalah pendidikan bagi komunitas ke arah konservasi dan penggunaan berkelanjutan sumberdaya alam. Keuntungan yang ketiga adalah pendapatan ekonomi. Komunitas memikirkan untuk membangun sebuah CBEM bagi generasi selanjutnya melalui diversifikasi dan penggunaan berkelanjutan dari alam.

Indikator sosio-ekonomi pada ekowisata, menunjukkan adanya keuntungan dan pembagian keuntungan. Ekowisata merupakan pilihan yang paling menguntungkan bagi komunitas dibandingkan dengan upah minimum dan pendapatan dari restoran (Foucat, 2002:522). Gambaran peningkatan pendapatan dalam ekowisata, dapat dihitung dengan memperkiraan keuntungan maksimum berdasarkan jumlah wisatawan dalam beberapa tahun. Sedangkan dalam Pembagian keuntungan pada ekowisata; merupakan kewajiban antara anggota kerjasama. Non anggota juga secara tidak langsung bergantung pada ekowisata semenjak aktivitas pertama yang berkaitan dengan wisata. Hal tersebut menunjukkan antara anggota dan non anggota mendapatkan keuntungan dari adanya kegiatan ekowisata

Indikator lingkungan menunjukkan adanya kesadaran dampak. Para anggota yang bekerjasama dengan komunitas, menyadari dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan di hulu seperti pertanian dan kehutanan, namun tidak menganggap kegiatan pariwisata sebagai tekanan yang

signifikan bagi lingkungan. Mereka juga tidak terlalu mempertimbangkan wisata sebagai tekanan yang penting bagi lingkungan. Namun, mereka tertarik untuk mendefinikan daya dukung lingkungan dari wilayah tersebut, untuk menghindari masalah yang disebabkan oleh kegiatan wisata di masa yang akan datang. Kegiatan konservasi dan rehabilitasi merupakan kegiatan yang berkelanjutan, yang menunjukkan komitmen dalam konservasi lingkungan. Sedangkan indikator politik menunjukkan bahwa, dengan adanya *Community-Based Ecotourism Management (CBEM)*, komunitas mampu bekerjasama dengan pihak di luar daerah, baik itu pemerintah, perguruan tinggi ataupun swasta. Hal tersebut menunjukkan bahwa CBEM dapat menciptakan hubungan ekonomi dengan sektor ekonomi lain di daerah tersebut (Foucat, 2002:522).

C. Peran *Stakeholder* dan dampaknya dalam *Community development* dalam Pengelolaan dan Pengembangan Ekowisata

Stakeholder dalam *community development* mengacu pada Smith (1991, 1997), menurut Mataritta-Cascante & Brennan (2012:295) merupakan komunitas yang terdiri dari keluarga, penduduk (rumah tangga), pemerintah, swasta, dan relawan dari sektor nonprofit, seperti NGO atau LSM. Berdasarkan uraian tersebut, *stakeholder* terdiri dari berbagai tingkatan dan komunitas masyarakat. *Stakeholder* merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang mengarah pada keberhasilan komunitas. *Stakeholder* berperan dalam melaksanakan, memfasilitasi, dan atau menerima kapasitas yang memberikan pencerahan sumberdaya secara terus menerus baik didalam maupun diluar komunitas. Melalui kapasitas ini, *stakeholder* mencari cara untuk menentukan bagaimana sumberdaya didistribusikan, ditukar dan dikelola (Matarrita-cascante & Brennan, 2012:295). Karena terdapat berbagai *stakeholder* yang terlibat, *community development* akan

menghasilkan berbagai macam *outcome* sesuai dengan sasaran dan tujuan masing-masing *stakeholder*, bentuk (proses) *community development* yang sesuai dengan *stakeholder* inginkan, penggunaannya, dan sumberdaya lokal yang dikelola *stakeholder* (Matarrita-cascante & Brennan, 2012:297).

Hasil Penelitian Han et al (2013: 327) yang mengkaji tentang keterlibatan *stakeholder* lokal dan inovasi sosial, dengan studi kasus di Korea, yakni kota Wonju dan Ansung, menyimpulkan bahwa keterlibatan *stakeholder* berkontribusi pada inovasi sosial pada masyarakat Korea. Keterlibatan *stakeholder* berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan sosial baru di kedua kota tersebut. Adanya kerjasama dan aktivis memberikan peran penting dalam menjembatani masyarakat umum, swasta, dan organisasi nonprofit, serta memfasilitasi inovasi sosial. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan berbagai *stakeholder*, jejaring, dan pengambilan keputusan yang demokratis, menjadi elemen penting yang mendorong kearah inovasi sosial. Keterlibatan beberapa *stakeholder* dapat meningkatkan komitmen individu dan asosiasi, pendanaan, kepercayaan, harapan positif, serta menciptakan inovasi sosial, seperti perawatan kesehatan masyarakat dan inisiatif keamanan pangan (Han, Chung, & Park, 2013:341). Hal ini dapat dilakukan karena pemerintah menyediakan dan memberikan berbagai dukungan secara tidak langsung, seperti membagikan informasi dan bekerjasama sebagai rekan, daripada mengendalikan kerjasama melalui subsidi finansial-pinjaman, untuk mempromosikan keberhasilan kebijakan pemerintah.

Kustanti et al (2014:150) dalam penelitiannya tentang peran *stakeholder* dalam pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan, mengemukakan bahwa kepentingan dalam memelihara area *green*

belt merupakan kesediaan diantara para *stakeholder*. Penelitian ini menggunakan analisis teori Schusser (2012) tentang kekuasaan, kepentingan, dan faktor keberhasilan peran *stakeholder* dalam pengelolaan hutan mangrove (Kustanti, 2014:152). Potensi konflik pada keanekaragaman hayati, produk non kayu, dan pemenuhan bahan bakar kayu membutuhkan beberapa regulasi, penelitian, dan aktifitas yang terkordinasi dalam pengelolaan mangrove terpadu. Pendidikan tentang keanekaragaman hutan mangrove juga perlu ditingkatkan oleh *stakeholder*. Hal ini berkaitan dengan dampak keberlanjutan dari pemanfaatan prodak hutan non kayu serta bahan bakar kayu untuk memenuhi kebutuhan energi skala rumah tangga. Regulasi pemerintah tentang penggunaan batang mangrove yang kering, juga diperlukan untuk upaya pemeliharaan hutan mangrove.

Sebagaimana disebutkan bahwa kelompok *stakeholder* pada proyek *community development*, mencoba untuk mempengaruhi desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi dari proyek *community development*. Hal tersebut berpotensi memunculkan konflik (Gyan & Ampomah, 2016:6). Gyan dan Ampomah (2016:1) melakukan studi tentang dampak konflik *stakeholder* terhadap proyek *community development* di Kenya. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dampak negatif dari konflik *stakeholder* pada proyek *community development* dapat memperlambat proses dalam *community development* itu sendiri. Penemuan ini memberikan bukti empiris bagi kebutuhan untuk menempatkan perhatian lebih bagi hubungan *stakeholder* dalam proses *community development*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun investasi finansial mempunyai kaitan dengan keberhasilan inisiatif *community development*, namun hubungan antara berbagai aktor dan kemampuan mereka untuk mempunyai kesamaan visi, tujuan maupun kepentingan, merupakan syarat utama bagi keberhasilan proyek (Gyan & Ampomah, 2016:6).

D. *Community development* dalam Ekowisata Mangrove

Sebagian besar ekowisata di kawasan lindung berusaha untuk menyeimbangkan tujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, memungkinkan akses bagi pengunjung untuk menikmati dan menghargai alam, serta mendukung pembangunan daerah (McCool, 2009:135). Hasil penelitian Bello et al. (2016:1) yang mengkaji batasan partisipasi komunitas dalam perencanaan wisata di kawasan lindung dengan studi kasus di Malawi, menunjukkan bahwa faktor pembatas penting yang mempengaruhi partisipasi komunitas pada perencanaan ekowisata diantaranya; sikap apatis, sumberdaya finansial yang tidak mencukupi, informasi yang minim, tingkat pendidikan yang rendah, pembagian keuntungan yang tidak merata, kurangnya koordinasi, dan konflik manusia dengan satwa liar. Penelitian tersebut menyimpulkan kebutuhan pendampingan partisipasi komunitas yang lebih besar, dan kebutuhan gabungan strategi yang khusus, dapat memfasilitasi partisipasi komunitas sesuai dengan konteks pembangunan negara. Pada proses perencanaan, keterlibatan *stakeholder* tidak dipungkiri. Karenanya, ekowisata juga sangat bergantung pada keterlibatan *stakeholder* sehingga perlu dilakukan usaha memperbaiki hubungan antara konservasi alam, pengembangan masyarakat lokal dan industri pariwisata (Ceballos-Lascurain, 1996:5). Wearing & Neil (2009:5) menyebutkan bahwa keterlibatan *stakeholder* harus mempertimbangkan dua poin, yakni siapa *stakeholder* yang dipertimbangkan pada perencanaan dan pengembangan ekowisata, serta bagaimana perencana dan pengembang harus melibatkan *stakeholder* dalam pembangunan pariwisata. Pada ekowisata yang merupakan kawasan lindung, *stakeholder* yang termasuk agen pengelola kawasan lindung diantaranya adalah pemerintah setempat, masyarakat sekitar, agen pembangunan desa, dan pengurus pariwisata (Bello,

Lovelock, & Carr, 2016:18). Beberapa ekowisata juga ada yang dirancang untuk meningkatkan ketahanan rumah tangga komunitas lokal dan pemeliharaan integritas sosial budaya komunitas lokal yang berbatasan dengan kawasan lindung (Mahony & Van Zyl, 2002:83).

Morales et al. (2014:42) dalam penelitiannya pesisir dan ekowisata mangrove di Pulau Katanduanes Filipina, menyimpulkan bahwa wisata berlebihan dapat menimbulkan ancaman. Hal itu dikarenakan adanya bentuk dan berbagai perspektif yang berbeda pada pengembangan dan ekowisata mangrove yang mendukung program pro masyarakat miskin. Selain itu, peningkatan ekowisata juga harus memperhatikan kelangsungan biota laut. Di saat yang sama, ekowisata yang bertanggung jawab juga harus bisa meningkatkan status penduduk desa yang miskin. Ekowisata muncul sebagai strategi pembangunan yang menguntungkan lingkungan dan sosial bagi komunitas perdesaan (Greening, 2014:2). Ekowisata juga dipercaya sebagai alat dalam memerangi kemiskinan dan melindungi lingkungan. Lebih jauh, Bello et al. (2016:50) mengemukakan bahwa partisipasi komunitas pada perencanaan ekowisata dianjurkan sama seperti arti pentingnya dalam mencapai pembangunan wisata berkelanjutan dan meningkatkan kehidupan komunitas lokal. Pendekatan ekowisata berbasis komunitas membutuhkan pertimbangan antara kualitas hidup masyarakat dan konservasi sumberdaya alam (Scheyvens, 1999:245). Ekowisata berbasis komunitas menekankan pada konservasi lingkungan, sehingga arah pengembangannya adalah melalui pendidikan, membangun kapasitas dan pengurangan kemiskinan (Reimer & Walter, 2013:122).